

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan saat ini merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bekerja dan beraktivitas. Pentingnya kesadaran dengan kesehatan masyarakat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat sehingga nilai kesehatan pada masyarakat dapat diterapkan dan menciptakan lingkungan yang bebas penyakit.

Pelayanan kesehatan yang kurang baik akan berdampak buruk bagi kegiatan masyarakat terutama pada kegiatan perekonomian, hal ini disebabkan salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akan kesehatan dan tidak pahamnya tentang pengetahuan mengenai pelayanan jaminan kesehatan yang dibentuk oleh pemerintahan dan pengalokasian dana untuk bantuan kesehatan masyarakat yang tidak tepat dapat merugikan masyarakat hal ini menyebabkan masyarakat dituntut untuk terus memahami akan pentingnya kesehatan (Mohanty, 2014).

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat dasar sangat penting bagi masyarakat untuk mengurangi beban layanan kesehatan yang akan dicakup rumah sakit, sehingga pemerintah membuat sebuah program jaminan kesehatan nasional yaitu berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS adalah lembaga yang menyelenggarakan Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan badan hukum publik milik negara nirlaba dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPJS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Peserta program BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 kelompok peserta baru dan transfer

program sebelumnya, Asuransi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat asuransi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Polisi, dan Jaminan Sosial Pekerja. Penerapan jaminan kesehatan BPJS tersebut dapat membantu meringankan beban biaya rumah sakit (Rahman dan Sari, 2015).

Penerapan BPJS yang berada di Bandar Lampung merupakan pusat informasi yang menangani pendaftaran maupun klaim. Pendaftaran yang dilakukan sendiri atau mandiri akan dikenakan biaya iuran BPJS dengan menyesuaikan kebutuhan kelas yang akan diambil. Setiap bulanya akan dilakukan penagihan kepada peserta BPJS yang terdaftar, tetapi jika peserta tidak membayarkan tagihan BPJS sebelum tanggal 10 yang telah ditetapkan BPJS, maka peserta akan dikenakan sanksi atau denda seperti peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 mengatur sanksi bagi peserta yang telat bayar iuran lebih dari sebulan yaitu penjaminan kepada peserta dihentikan sementara Penjaminan akan aktif kembali setelah peserta melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan. Ketika status kepesertaan kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKRTL) (www.panduanbpjs.com, 2018). Namun, apabila dalam rentang waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, dikenakan denda 2,5 persen dari total perawatan dirumah sakit, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi peserta BPJS.

Seperti di lansir pada (SUMUTPOS.CO) Sebanyak 200 ribu warga Kota Medan yang tercatat sebagai peserta BPJS Mandiri menunggak pembayaran iuran. Tak tanggung-tanggung, tunggakan iuran mencapai Rp100 miliar. BESARNYA tunggakan tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Indonesia (PBI) di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan. Dalam RDP tersebut, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kota Medan Supriyanto mengakui, pihaknya saat ini kesulitan membayar tagihan rumah sakit.

Diutarakan Supriyanto, tunggakan itu membuat aktivitas operasional BPJS Kesehatan menjadi terganggu. “Dari 200.000 warga yang menunggak, 101.000 di antaranya pasien Kelas III,” sebutnya. Peserta BPJS yang menunggak iuran pembayarannya justru akan merugikan yang bersangkutan. Selain kartu BPJS-nya non aktif sementara, peserta mandiri juga akan dikenakan biaya denda dari tunggakannya. Namun jika telah menyelesaikan kewajiban iuran beserta tunggakannya tersebut, kartunya bisa diaktifkan kembali. Ketua Pansus Penduduk Miskin dan PBI DPRD Medan, BahrumSyah menyarankan agar peserta yang menunggak segera dievaluasi. Selain itu, diminta supaya migrasi masuk PBI di kelas III. Untuk diketahui, BPJS Mandiri merupakan program dari BPJS Kesehatan. Dalam program ini tersedia 3 jenis kelas yaitu Kelas I dengan iuran peserta Rp80 ribu perbulan, Kelas II dengan iuran peserta Rp51 ribu dan kelas III dengan iuran peserta Rp25.500. Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan dan dibayar sebelum tanggal 10.

BPJS perlu memberikan himbauan atau memiliki strategi agar masyarakat lebih disiplin membayar tagihan BPJS. BPJS sudah memiliki sistem pengingat tetapi pada cabang Bandar Lampung belum menerapkan sistem yang dapat menginformasikan tagihan BPJS ke masyarakat dengan mudah untuk menambah kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan teknologi SMS. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dalam mendapatkan informasi dengan judul “**Rancang Bangun Aplikasi Pengingat Tagihan BPJS (Study Kasus: BPJS Bandar Lampung)**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yaitu bagaiman merancang dan membangun aplikasi pengingat tagihan BPJS (Studi Kasus : BPJS Bandar Lampung) yang dapat menyampaikan informasi tagihan BPJS kepada peserta BPJS yang terdaftar ?

1.3 Batasan masalah

Agar penelitian dalam rencana skripsi ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu :

1. Membahas perancangan mengenai pengingat tagihan BPJS berbasis *web* dengan penyampaian informasi menggunakan *SMS Gateway*.
2. Program yang digunakan untuk perancangan Adobe Dreamweaver CS6, dan *MySQL* sebagai database penyimpanan data.
3. Penyampaian informasi pengingat tagihan BPJS menggunakan SMS.

4. Pembahasan pada penelitian hanya sampai tahap pengujian
5. Pembahasan pengembangan sistem sampai pada tahap testing.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu, merancang aplikasi pengingat tagihan BPJS menggunakan *web* dan *SMS Gateway*.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi peserta BPJS yang terdaftar, diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tagihan BPJS dengan mudah setiap akan mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Pesan atau pengingat yang disampaikan ke peserta menggunakan media *SMS* sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tagihan tanpa harus datang ke kantor BPJS Bandar Lampung.